

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Literatur

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mencari informasi dari berbagai penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kelebihan maupun kekurangan yang telah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku dan skripsi untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan, dengan tujuan memperoleh dasar teori yang ilmiah.

**Tabel 2.1 Tinjauan Literatur**

	<b>Judul</b>	<b>Penulis</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
	Kolaborasi Multi-Pihak dalam Pengelolaan Sampah Plastik di Jakarta	Kusumah, Y. W., & Suharto, R. B. (2020)	Menyoroti peran WWF sebagai organisasi non-pemerintah	Mengeksplorasi kemitraan dengan pemerintah dan sektor swasta
	Peran WWF dalam Mengurangi Sampah Plastik di Jakarta	Sari, A., & Wijaya, R. (2021)	Membahas upaya WWF dalam menanggulangi sampah plastik di DKI Jakarta	Fokus pada program edukasi dan kampanye
	<i>Menuju Jakarta Bebas Sampah Plastik: Implementasi Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat</i>	Hariani, S., & Darmawan, A. (2023)	Menganalisis kebijakan WWF untuk mengatasi sampah plastik di Jakarta. Dan Menekankan peran	Berfokus pada kebijakan dan partisipasi, bukan solusi teknis. Studi kasus di Jakarta Pusat.

			partisipasi masyarakat	
	<i>Membangun Ketahanan Masyarakat Terhadap Sampah Plastik: Kajian di Kepulauan Seribu</i>	Rahayu, N. W., & Asri, A. (2023).	Menginvestigasi program edukasi WWF tentang sampah plastik di Kepulauan Seribu. Mengkaji ketahanan masyarakat terhadap dampak sampah plastik.	Berfokus pada edukasi dan ketahanan masyarakat. Studi kasus di Kepulauan Seribu.
	<i>Mengubah Perilaku Konsumen: Strategi WWF Mengurangi Penggunaan Plastik Sekali Pakai di DKI Jakarta</i>	Rahmat, F., & Sukmawati, I. (2022).	Menganalisis strategi WWF untuk mengubah perilaku konsumen terkait plastik sekali pakai. Mengkaji efektivitas strategi tersebut.	Berfokus pada perubahan perilaku konsumen. Tidak membahas solusi teknis.
	<i>Kolaborasi Multi-Pihak: Kunci Sukses Pengelolaan Sampah Plastik di DKI Jakarta</i>	Sari, D. P., & Wulandari, D. (2022).	Menjelaskan peran WWF dalam membangun kolaborasi multi-pihak untuk mengatasi sampah plastik. Mengidentifikasi tantangan dan peluang kolaborasi.	Menekankan pentingnya kolaborasi multi-pihak. Tidak membahas solusi teknis.

	<i>Daur Ulang Plastik: Upaya WWF Meningkatkan Nilai Ekonomi Sampah Plastik di DKI Jakarta</i>	Hasanah, N., & Supriyono, E. (2022).	Menganalisis program daur ulang plastik WWF di DKI Jakarta. Menilai dampak ekonomi program tersebut.	Berfokus pada daur ulang dan nilai ekonomi sampah plastik. Tidak membahas edukasi konsumen.
	<i>Inovasi Teknologi: Solusi WWF Mengatasi Sampah Plastik di DKI Jakarta</i>	Gunawan, D., & Wardoyo, B. (2021).	Mempresentasikan solusi teknologi yang diusung WWF untuk mengatasi sampah plastik. Menilai potensi dan tantangan penerapan teknologi.	Berfokus pada solusi teknologi. Kurang membahas peran masyarakat.
	<i>Kebijakan Plastik Sekali Pakai: Tinjauan Komparatif Implementasi di DKI Jakarta dan Kota-Kota Lain</i>	Purnama, A., & Andini, S. (2021).	Membandingkan kebijakan plastik sekali pakai di DKI Jakarta dengan kota lain. Menganalisis efektivitas kebijakan tersebut.	Melakukan studi komparatif. Kurang membahas peran WWF.
	<i>Dampak Sampah Plastik terhadap Ekosistem Laut: Kajian di Teluk Jakarta</i>	Haryanto, T., & Fitriani, N. (2021)	Menginvestigasi dampak sampah plastik terhadap ekosistem laut di Teluk Jakarta. Merumuskan solusi untuk mengurangi dampak tersebut	Berfokus pada dampak ekologi. Kurang membahas peran WWF.

## **2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual**

### **2.2.1 Teori Non-Government Organization**

*Non-Governmental Organizations* (NGOs) adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak di berbagai bidang seperti kemanusiaan, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan hak asasi manusia. Menurut Lewis (2009), NGO adalah organisasi yang berorientasi pada layanan publik, independen dari kontrol pemerintah, dan bertujuan non-profit (David Lewis, Nazneen Kanji, 2020). Peran NGO sangat beragam, mencakup advokasi kebijakan, pemberian layanan sosial, dan pelaksanaan proyek pembangunan baik di tingkat lokal maupun global. Dalam konteks pengelolaan sampah di DKI Jakarta, NGO seperti WWF memainkan peran penting. Mereka mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik, mendorong perubahan kebijakan terkait pengurangan sampah, dan melaksanakan proyek-proyek konkret seperti pengembangan bank sampah dan fasilitas daur ulang. Selain itu, NGO sering kali bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas program mereka (Najmudin et al., 2023). Dengan pendekatan komunitas dan kolaboratif, NGO berkontribusi signifikan dalam menangani isu-isu yang mungkin tidak mendapat perhatian memadai dari pemerintah atau sektor swasta. Peran ini menjadikan NGO sebagai aktor kunci dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan menghadapi tantangan lingkungan seperti permasalahan sampah di perkotaan (Akurugu et al., 2023).

Teori NGO mencakup beberapa model utama yang membentuk pendekatan organisasi non-pemerintah dalam menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan. Pertama, Model Pengembangan Komunitas melibatkan kerja langsung dengan komunitas lokal untuk mengidentifikasi masalah dan menciptakan solusi yang sesuai. Dalam konteks pengelolaan sampah, ini mencakup program edukasi, pengembangan infrastruktur pengolahan sampah, dan inisiatif daur ulang (Gasco-Hernandez et al., 2022). Kedua, Model Advokasi Kebijakan melibatkan peran NGO dalam mempengaruhi kebijakan publik. Mereka melakukan kampanye,

penelitian, dan lobi kepada pembuat kebijakan untuk mengubah atau meningkatkan kebijakan terkait pengelolaan sampah (Kuslantasi et al., 2022). Ketiga, Model Kemitraan dan Kolaborasi melibatkan kerja sama antara NGO, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Ini dapat mencakup proyek bersama, pendanaan, dan pertukaran sumber daya dan keahlian. Melalui model-model ini, NGO dapat memainkan peran yang signifikan dalam memperbaiki kondisi sosial dan lingkungan, termasuk mengatasi masalah sampah di komunitas lokal. Dengan berfokus pada kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, NGO dapat mencapai dampak yang lebih besar dalam menciptakan perubahan positif dan berkelanjutan (Ismail, 2021).

Pendekatan ekologi sosial, yang diperkenalkan oleh Murray Bookchin, menyoroti keterkaitan antara masalah lingkungan dengan konteks sosial dan politik yang lebih luas. Menurut Bookchin, isu lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, tidak dapat dipahami secara terpisah dari dinamika sosial dan politik yang ada. Dalam hal ini, WWF dapat mengadopsi pendekatan ini dengan menyelaraskan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam upaya mereka untuk menemukan solusi yang berkelanjutan terhadap permasalahan sampah di DKI Jakarta. Ini berarti tidak hanya memperhatikan aspek teknis pengelolaan sampah, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan dan keinginan masyarakat, struktur ekonomi lokal, dan kebijakan pemerintah (Pratiwi et al., 2022). Dengan demikian, WWF dapat merancang program-program yang tidak hanya efektif dalam mengurangi sampah, tetapi juga memperkuat kedermawanan sosial, memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, dan memengaruhi kebijakan lingkungan yang lebih baik. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek ini secara holistik, WWF dapat menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan memperkuat hubungan antara manusia dan lingkungan (Harto et al., 2020)

Teori dan model operasional NGO dapat diterapkan secara efektif dalam konteks upaya WWF untuk mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta. Melalui pendekatan

pengembangan komunitas, advokasi kebijakan, kemitraan, dan integrasi ekologi sosial, WWF dapat mengimplementasikan program-program yang berkelanjutan dan berdampak positif. Evaluasi keberhasilan program harus dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa tujuan yang diharapkan tercapai dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat di DKI Jakarta.

### **2.2.2 Teori Green Politic**

Konsep dasar *green politics* atau Teori Politik Hijau merujuk pada pendekatan yang mengutamakan perlindungan lingkungan alam dan kesejahteraan manusia secara seimbang. Asal usulnya dapat ditelusuri dari gerakan lingkungan yang mulai muncul pada pertengahan abad ke-20, terutama di negara-negara Barat yang mulai menyadari dampak negatif dari industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa batas. Teori ini berkembang menjadi landasan bagi organisasi lingkungan seperti WWF dalam upaya mereka untuk melindungi alam dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan (Ma et al., 2024).

Definisi teori *green politics* melibatkan pandangan bahwa keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat adalah prinsip-prinsip utama yang harus ditekankan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan politik (Iqbal et al., 2022). Keberlanjutan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi untuk generasi saat ini dan masa depan. Keadilan lingkungan menuntut perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terpengaruh oleh kebijakan lingkungan, tanpa diskriminasi sosial atau ekonomi. Partisipasi masyarakat menekankan pentingnya melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi WWF dan organisasi lingkungan lainnya dalam merumuskan kebijakan dan program-program untuk mengatasi tantangan lingkungan seperti permasalahan sampah di DKI Jakarta (Zhuang et al., 2024).

Teori *Green Politics* menyoroti pengaruh konsumsi berlebihan dan pembangunan tak terbatas terhadap lingkungan. Konsumsi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi tanpa batas cenderung menghasilkan dampak negatif pada lingkungan, termasuk meningkatnya masalah sampah. Peningkatan produksi dan konsumsi barang menghasilkan limbah yang tidak dikelola dengan baik, menciptakan pencemaran lingkungan dan merusak ekosistem alami (Yusran & Asnelly, 2017).

Selain itu, teori *green politics* menekankan hubungan erat antara manusia dan lingkungan. Manusia dianggap sebagai bagian integral dari ekosistem alami dan memiliki tanggung jawab moral untuk melindunginya. Pandangan ini menolak pandangan antroposentris yang mengabaikan pentingnya keberlangsungan lingkungan demi kepentingan manusia semata. Sebaliknya, teori ini mengajak untuk memperlakukan lingkungan sebagai subjek yang memiliki nilai intrinsik dan hak-haknya sendiri (Newell, 2019)

Dalam konteks masalah sampah, perspektif teori *green politics* memandangnya sebagai dampak dari siklus konsumsi dan pembangunan yang tidak berkelanjutan (Peters, 2019). Upaya untuk mengatasi masalah sampah tidak hanya mencakup manajemen limbah yang lebih baik, tetapi juga membutuhkan perubahan dalam pola konsumsi dan pendekatan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip teori *green politics* yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekologi dan mengutamakan keberlanjutan dalam setiap kebijakan dan Tindakan (Illés & Körösenyi, 2022).

WWF memegang peran penting dalam konteks Teori *green politics* dengan tujuan utama untuk melindungi alam dan mendorong keberlanjutan lingkungan hidup. Organisasi ini secara aktif terlibat dalam mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta, sebagai bagian dari upaya mereka dalam mewujudkan prinsip-prinsip teori politik hijau. Peran WWF meliputi pengedukasian masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan partisipasi dalam kampanye kesadaran masyarakat. Mereka juga melakukan inisiatif konkrit

seperti proyek-proyek konservasi lingkungan dan program-program peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Dalam penerapan prinsip-prinsip Teori *green politics*, WWF menekankan pentingnya keadilan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan dalam setiap kegiatan dan program yang mereka lakukan. Mereka menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan sampah dan mempromosikan gaya hidup yang ramah lingkungan. Melalui upaya-upaya ini, WWF berperan sebagai agen perubahan yang berkomitmen dalam mewujudkan prinsip-prinsip Teori *green politics*, sehingga memberikan dampak positif yang signifikan bagi lingkungan hidup dan masyarakat di DKI Jakarta (Yamin et al., 2022).

Kerangka teoritis ini memberikan fondasi kokoh untuk mengeksplorasi penerapan teori politik hijau dalam upaya konkret WWF dalam menangani permasalahan sampah di DKI Jakarta (Wambrauw & Sinaga, 2023). Dengan fokus pada prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan lingkungan, dan partisipasi masyarakat, analisis dapat dilakukan terhadap program-program WWF yang bertujuan untuk mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Dengan memahami bagaimana konsep-konsep teori ini diterapkan dalam praktik, dapat diidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan dampak dari upaya tersebut. Dengan demikian, kerangka teoritis ini memberikan panduan yang jelas untuk mengevaluasi efektivitas program WWF serta mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan masa depan, baik dalam hal strategi implementasi maupun advokasi kebijakan (Daggash et al., 2019).

### 2.2.3 *Multi-Stakeholders Governance*

*Multi-Stakeholder Governance* merupakan pendekatan pengelolaan yang melibatkan berbagai pihak atau *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan peran dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Karakteristik utamanya meliputi inklusivitas, partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait, transparansi, akuntabilitas, dan kerjasama lintas sektor. Dalam konteks lingkungan dan pembangunan, *multi-stakeholder governance* sering digunakan untuk mengatasi tantangan kompleks seperti perubahan iklim, keberlanjutan sumber daya alam, dan pengelolaan limbah (Taufik et al., 2021). Misalnya, dalam pengurangan sampah, model ini melibatkan pemerintah, industri, masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi non-pemerintah seperti WWF. Mereka bekerja bersama untuk merancang kebijakan, mengembangkan program, dan melakukan tindakan konkret untuk mengurangi dampak sampah.

Dalam upaya mengidentifikasi *stakeholder* terkait penanganan masalah sampah di DKI Jakarta, beberapa entitas kunci perlu diperhatikan. Pemerintah memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan program penanganan sampah. Hal ini meliputi Pemerintah Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Kota Jakarta serta instansi terkait lainnya. Swasta termasuk industri dan sektor perdagangan memiliki tanggung jawab dalam mengelola limbah yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi mereka. Kolaborasi dengan sektor swasta diperlukan untuk memperkenalkan praktik pengelolaan limbah yang berkelanjutan (Cannatelli & Antoldi, 2013). Masyarakat, baik dalam bentuk organisasi, komunitas, maupun individu, merupakan pihak yang berdampak langsung dan memiliki kepentingan dalam penanganan sampah. Mereka dapat berperan dalam mengedukasi, menggalang dukungan, dan mengambil tindakan nyata dalam pengurangan sampah (Febriana & Paksi, 2023). Akademisi dan peneliti memberikan kontribusi penting melalui penelitian, pengetahuan, dan inovasi dalam pengembangan solusi-solusi baru untuk penanganan sampah

yang lebih efektif. Media massa memiliki peran penting dalam menyuarakan isu-isu lingkungan, termasuk masalah sampah, sehingga memengaruhi kesadaran dan partisipasi masyarakat serta membentuk opini publik terkait. Lembaga donor dan lembaga internasional, termasuk WWF, memberikan dukungan finansial, teknis, dan kelembagaan dalam upaya mengatasi masalah sampah di DKI Jakarta. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga ini dapat memperkuat kapasitas dan efektivitas program penanganan sampah (Li et al., 2022)

#### **2.2.4 *Circular Economy***

*Circular Economy* merupakan paradigma ekonomi yang berupaya meminimalisir limbah dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Berbeda dengan model ekonomi linier yang berorientasi pada "ambil, buat, buang," *Circular Economy* mengedepankan siklus tertutup dimana material dan produk didaur ulang, diperbaiki, dan digunakan kembali sebanyak mungkin (Lopes de Sousa Jabbour et al., 2019). Prinsip utama yang menjadi fondasi *Circular Economy* adalah *Reduce* (mengurangi konsumsi material dan energi), *Reuse* (menggunakan kembali produk dan material tanpa proses tambahan), *Recycle* (mengolah kembali material menjadi produk baru), *Recovery* (memulihkan energi dari limbah yang tidak bisa didaur ulang), dan *Repair* (memperbaiki produk yang rusak agar bisa digunakan kembali). Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengelola limbah secara lebih efektif tetapi juga mendorong intervensi di berbagai sektor ekonomi untuk mencapai efisiensi sumber daya dan mengurangi emisi karbon. Dengan demikian, *Circular Economy* menawarkan solusi holistik untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, mengurangi tekanan terhadap lingkungan, dan membangun ketahanan ekonomi yang lebih besar terhadap fluktuasi sumber daya global (Subekti, 2023).

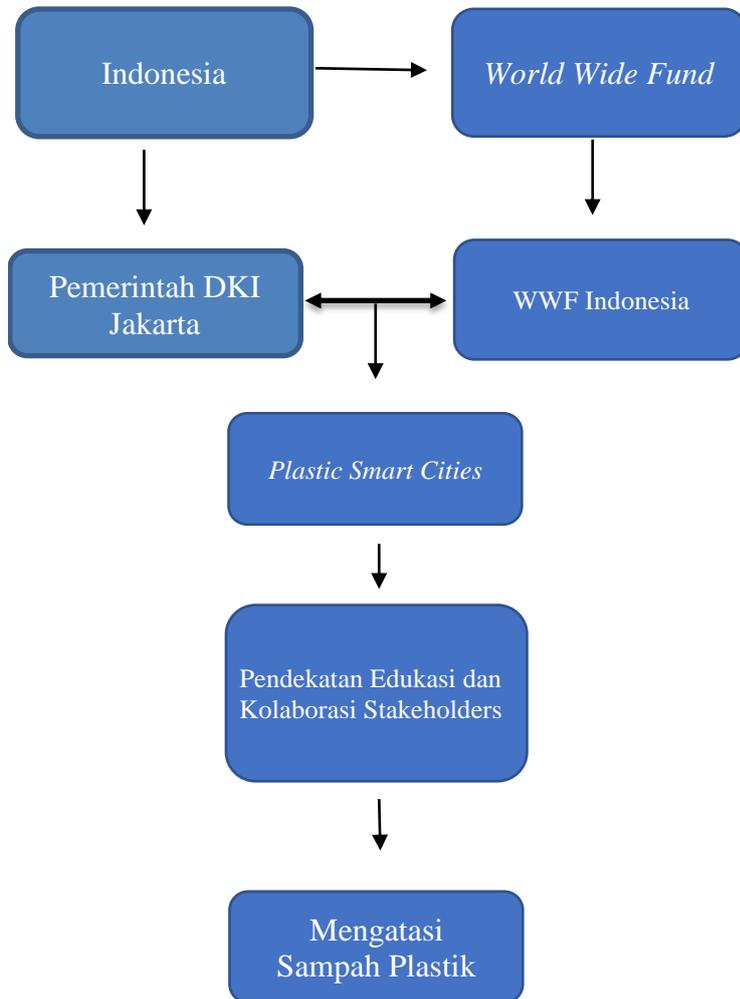
Dengan menggunakan konsep Model *Circular Economy* sebagai kerangka teoritis, skripsi ini akan memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas dan dampak upaya WWF

dalam menanggulangi sampah plastik di DKI Jakarta, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan program di masa depan.

### **2.3 Asumsi Penelitian**

Dalam konteks permasalahan sampah plastik yang semakin mendesak di DKI Jakarta, upaya yang dilakukan oleh *World Wide Fund for Nature* (WWF) memegang peranan penting dalam mengatasi isu ini. WWF, sebagai organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pelestarian lingkungan, telah mengimplementasikan serangkaian strategi yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah plastik dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan lingkungan. Asumsi dari penelitian ini adalah bahwa upaya yang dilakukan oleh WWF, melalui program *Plastic Smart Cities* (PSC) dengan pendekatan edukasi masyarakat, pengurangan penggunaan plastik, dan promosi daur ulang, memiliki dampak positif signifikan terhadap pengurangan volume sampah plastik dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan lingkungan di DKI Jakarta.

## 2.2 Kerangka Analisis



Gambar 2.1 skema dan alur penelitian